



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)
TAHUN 2023**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2023**

Kata Pengantar

Alhamdulillah segala Puji dan Kebesaran hanya milik ALLAH SWT, yang atas izin-Nya sehingga Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Penyusunan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon pada dasarnya mengetengahkan gambaran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara utuh sepanjang Tahun 2023 yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kinerja dalam mencapai visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon yaitu “ **Mewujudkan Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Cirebon Dalam Menghadapi Bencana**“

Untuk itulah semua kritik, saran dan masukan yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan dari berbagai pihak, guna penyempurnaan dimasa mendatang.

Ditetapkan di : Sumber
Pada Tanggal : Februari 2024














Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Cirebon

Dr. DENI NURCAHYA, ST., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19711021 200501 1 003










Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR DATA DAN GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi	1
1.2 Fungsi dan Tugas	3
1.3 Isu-Isu Strategis	3
1.4 Keadaan Pegawai	4
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	6
1.6 Keuangan	8
1.7 Sistematika LKjIP	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Perencanaan Strategis	10
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	11
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	12
2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan	13
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	13
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022	15
2.3.1 Target Belanja BPBD	15
2.3.2 Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis	15
BAB AKUNTABILITAS KINERJA	16
III	
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022	16
3.2 Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	18
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya	27
3.4 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	
3.5 Realisasi Anggaran	33
3.6 Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan	36
3.7 Inovasi	66
3.8 Kerjasama Lintas Sektoral	66
BAB PENUTUP	69
IV	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Daftar Tabel

-  Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja
-  Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2022 (Sasaran Strategis dan Program)
-  Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan
-  Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022
-  Tabel 3.5. Capaian Indikator Sasaran BPBD Tahun 2017-2022
-  Tabel 3.6. Meta Data Indikator Kinerja
-  Tabel 3.7. Capaian Standar Pelayanan Minimal/Indikator Kinerja Kunci Outcome Sub Urusan Bencana Tahun 2022
-  Tabel 3.8. Perbandingan Evaluasi Kinerja dengan OPD BPBD Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta Tahun 2022
-  Tabel 3.9. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2022
-  Tabel 3.10. Analisis efisiensi
-  Tabel 3.11. Formula Indikator Program BPBD
-  Tabel 3.12. Meta Data Indikator Kinerja Program Tahun 2017 – 2022
-  Tabel 3.13. Data KTB Tahun 2013 – 2022
-  Tabel 3.14. Korban Terdampak Bencana Tahun 2022
-  Tabel 3.15. Daftar Warga Terdampak Bencana yang Menerima Bantuan Material Non Permanen
-  Tabel 3.16. Realisasi Fisik dan Keuangan Output Sub Kegiatan Tahun 2022

Daftar Gambar

-  Gambar 3.1. Pentahelix Penanggulangan Bencana
-  Gambar 3.2. Hubungan Aspek Penanggulangan Bencana dan Indikator Kinerja BPBD
-  Gambar 3.3. Target dan Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2022
-  Gambar 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam RENSTRA
-  Gambar 3.5. Hubungan Output Sub Kegiatan Dan Indikator SPM
-  Gambar 3.6. Hubungan Output Sub Kegiatan Dan Indikator Kinerja Sasaran dan Program
-  Gambar 3.7. Tabulasi Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran dan Program BPBD Tahun 2022
-  Gambar 3.8. Frekuensi Kejadian Bencana Alam Tahun 2022
-  Gambar 3.9. Frekuensi Pemulian Jenazah Prokes Covid-19 Tahun 2022

BAB 1

Pendahuluan

Bab 1 Berisi :

1. *Struktur Organisasi*
2. *Fungsi dan Tugas*
3. *Isu Strategis*
4. *Keadaan Pegawai*
5. *Keadaan Sarana dan Prasarana*
6. *Keuangan*
7. *Sistematika LKIP*

Pada awalnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon. Kemudian pada Tahun 2021 ada Perubahan SOTK pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon yang kemudian dilengkapi dengan Peraturan Bupati Cirebon No. 32 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Tahun 2023 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh BPBD.

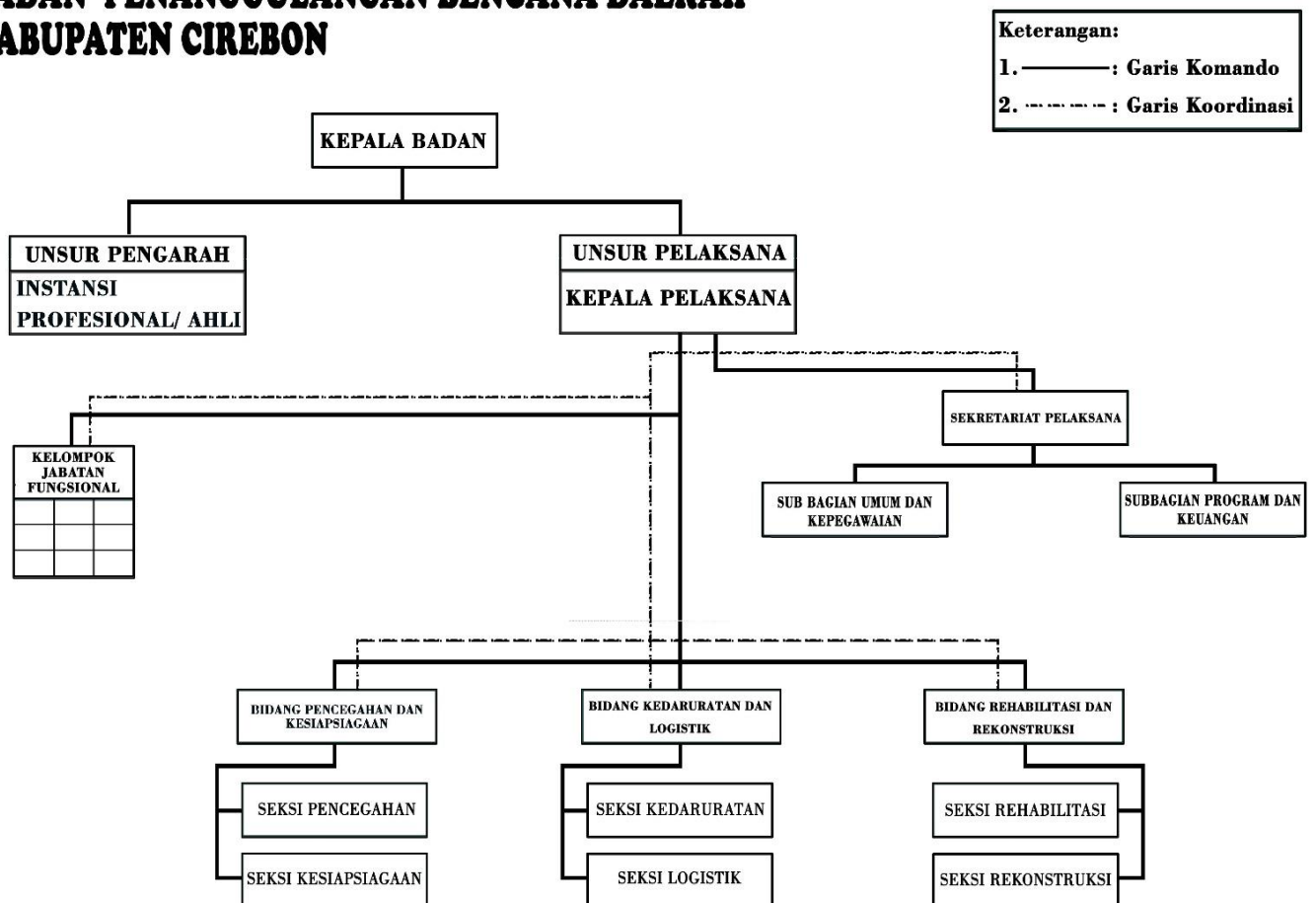
2. Mendorong BPBD didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPBD untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap BPBD di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon No. 32 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon, maka dapat dilihat bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon seperti gambar di bawah ini :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN CIREBON



1.2 Fungsi dan Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon No. 32 Tahun 2022 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pengoordinasian urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPBD mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang penanggulangan bencana daerah;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
5. Penataan sistem dasar penanggulangan bencana ;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pealporan bidang penanggulangan bencana daerah;
7. Pelaksanaan adminnistrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Isu-isu Strategis

Merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan dan memiliki dampak dalam jangka waktu tertentu bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis tersebut adalah :

1. Sinergisitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pemerintah, swasta dan masyarakat belum maksimal;
2. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana terutama pada daerah rawan bencana belum sepenuhnya terlaksana;
3. Belum memadainya sarana dan prasarana penanganan bencana baik secara kuantitas maupun kualitas;

1.4 Keadaan Pegawai

1.4.1. Kondisi Riil Pegawai Berdasarkan , Golongan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Jumlah personil yang ada per Desember 2023 sebanyak 62 (enam puluh dua) orang yang terdiri dari 18 orang ASN dan 42 orang TKK. Untuk rincian personil ASN dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1. ASN BPBD Berdasarkan Jabatan dan Golongan

No	Golongan	Jenis Kelamin		Pendidikan				
		L	P	S3	S2	S1	SMA	SMP
1.	VI/c							
2.	VI/b	2		1	1			
3.	VI/a		2		2			
4.	III/d	3	2			5		
5.	III/c	3				3		
6.	III/b	1				1		
7.	III/a	1					1	
8.	II/d	2					2	
9.	II/c							
10.	II/b	1					1	
11.	II/a	1					1	
	Jumlah	14	4	1	3	9	5	

Tabel 1.2. Rekapitulasi Pemenuhan Anjab Tahun 2023

Komposisi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon				
No	Unit kerja	PNS	Honorer	Jumlah
1.	Kepala Pelaksana	1	-	1
2.	Sekretaris	6	13	19
3.	Bidang Kedaruratan dan Logistik	4	29	33
4.	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	4	1	5
5.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	3	1	4
JUMLAH		18	44	62

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Melihat tupoksi BPBD yang begitu banyak tidak berbanding dengan kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Cirebon. Sehingga dikarenakan kekurangan SDM yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Cirebon, maka BPBD Kabupaten Cirebon belum mampu mengerjakan seluruh tupoksi dengan maksimal. Kredibilitas pegawai merupakan penunjang terbesar dalam keberhasilan melakukan pelayanan kepada masyarakat dan faktor penunjang terlaksananya program kegiatan dengan maksimal.

Maka dibutuhkan penambahan pegawai BPBD Kabupaten Cirebon yang mempunyai kredibilitas dalam management penanggulangan bencana, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Sebagai acuan dalam pemenuhan jumlah kebutuhan pegawai untuk mengisi jabatan-jabatan yang dibutuhkan di BPBD Kabupaten Cirebon dapat di lihat pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel 1.4. Kelengkapan Sarana dan Prasarana BPBD

NO	NAMA BARANG	KONDISI (B/BR/RB)	JUMLAH BARANG	NILAI BARANG (RP.)
1	Software	Baik	1	87.912.000
2	Acces Point	Baik	1	4.234.000
3	Gergaji Chain Saw	Baik	2	25.168.000
4	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)	Baik	3	65.208.000
5	Perahu Motor Tempel	Baik	2	29.744.000
6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik	6	21.950.000
7	Router	Baik	1	1.359.000
8	Server	Baik	2	368.000.000
9	Tandu	Baik	4	13.746.000
10	Tenda Pleton	Baik	8	124.475.000
11	Transportable Water Pump	Baik	4	16.484.000
12	Kabel UTP	Baik	2	456.000
13	Life Jacket	Baik	75	21.000.000
	JUMLAH		111	779.736.000

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPBD pada Tahun 2023 berasal dari APBD Kabupaten Cirebon. Pada tahun anggaran 2023 BPBD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 7.500.184.100,- dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp 3.835.813.600,- belanja barang dan jasa sebesar Rp 2.965.586.500,- dan belanja modal sebesar Rp 698.784.000,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran startegis maupun program-program pendukung.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPBD Kota Yogyakarta tahun 2023 adalah sebagai berikut: Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapaitujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala- kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP/manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi BPBD, Potensi yang menjadi ruang lingkup BPBD dan Sistematika penulisan LKIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah- langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB 2

Perencanaan Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Perjanjian Kinerja Tahun 2023*
3. *Rencana Anggaran Tahun 2023*

1.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2019, BPBD menyusun Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2019-2024. Renstra BPBD merupakan manifestasi komitmen BPBD dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra BPBD Tahun 2019-2024 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di BPBD yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkelanjutan.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024 sebagai berikut,

Tabel 2.1. Ringkasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Agamis, Maju dan Aman	Memelihara keamanan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional	Pencapaian efektifitas penyelenggaraan penanggulangan bencana
0		

(Sumber: RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024)

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BPBD mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah untuk “Infrastruktur Wilayah Meningkatkan”. Hal ini dilatar belakangi dengan kondisi penanggulangan bencana di Kabupaten Cirebon dimana belum tersedia sebuah sistem yang terintegrasi dan terpadu antara pemerintah, masyarakat dan swasta, baik dalam penyediaan sarana dan prasarana, manajemen, maupun kegiatan operasional dalam penanganan kebencanaan secara umum, sehingga perancangan sistem terpadu antara pemerintah, swast dan masyarakat dan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana untuk meminimalisir risiko bencana sangat diperlukan.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan konsep terintegrasi yaitu mengurangi risiko bencana – menanggulangi bencana secara cepat – membangun kembali masyarakat dan lingkungan yang terdampak bencana. Untuk itu, RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 menyebutkan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang terkait dengan penanggulangan bencana adalah:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Indeks Ketahanan/ Kapasitas Daerah	Menurunnya indeks risiko bencana	Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana Pengurusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan Peningkatan kemitraan multipihak dalam penanggulangan bencana Pemenuhan tata kelola yang baik bidang penanggulangan bencana Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana Peningkatan kapasitas dan efektivitas pemulihan bencana	Meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana
			Penguatan tata kelola penanggulangan bencana
			Meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana
			Penguatan tata kelola penanggulangan bencana
			Peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana
			Peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana
			Peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tujuan

Dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 disebutkan Tujuan dan sasaran strategis BPBD Kabupaten Cirebon yang akan dicapai dalam 5 tahun anggaran, yaitu:

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis BPBD Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Indeks Ketahanan/ Kapasitas Daerah	Menurunnya Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Point	170,80	165,80	160,80	155,80	150,80

2.1.3. Strategi, Program dan Kegiatan

Tujuan dan sasaran Strategis BPBD Kabupaten Cirebon tersebut, kemudian dijabarkan dalam strategi dan program kegiatan yang digunakan, sebagaimana termuat dalam table berikut ini:

Tabel 2.3. Strategi, Program dan Kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
1	Menurunnya Indeks Risiko Bencana	Program Penanggulangan Bencana	1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota 2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	2	3	4	5
1	Menurunnya Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Point	150,80

Selain memuat Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis, Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2023 juga memuat Perjanjian Kinerja Sasaran Program, sebagai berikut:

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	2	3	4	5
1	Penanggulangan Bencana	Proesentase Peningkatan Pencapaian SPM Penanggulangan Bencana	Persentase (%)	90,59

Pada tahun 2023, BPBD melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena mengikuti perubahan Rencana Kerja dan review Renstra 2023. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	2	3	4	5
1	Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Indeks Risiko Bencana	Indeks	150,80

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	2	3	4	5
1	Penanggulangan Bencana	Proesentase Peningkatan Pencapaian SPM Penanggulangan Bencana	Persentase (%)	90,59

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 BPBD melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 7.500.184.100,- dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp 3.835.813.600,- belanja barang dan jasa sebesar Rp 2.965.586.500,- dan belanja modal sebesar Rp 698.784.000,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

2.3.1. Target Belanja BPBD

Jika dibuat dalam bentuk perbandingan alokasi masing-masing belanja, maka persentase dari masing-masing jenis belanja APBD Perubahan BPBD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6. Target Belanja BPBD APBD Perubahan Tahun 2023

Uraian	Target	Proesentase
Belanja Pegawai	Rp. 3.835.813.600,-	86,70%
Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.965.586.500,-	92,40%
Belanja Modal	Rp 698.784.000,-	99,60%
Jumlah	Rp 7.500.184.100,-	100%

2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2023 BPBD yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran	Proesentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Menurunnya Indeks Risiko Bencana	Rp 7.500.184.100,-	100%	Program Penanggulangan Bencana Rp 2.594.838.600,- 1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota Rp. 91.109.400,- 2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Rp 1.681.764.800,- 3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Rp 700.000.000,- 4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Rp 121.964.400,-

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2023*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya*
4. *Realisasi Anggaran*

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Catatan sejarah kejadian bencana Kabupaten Cirebon menunjukkan bahwa Kabupaten Cirebon merupakan daerah rawan bencana. Dalam rentang 2017 sampai tahun 2023, Kabupaten Cirebon telah mengalami 41 kali kejadian bencana (DIBI, 2022). Kejadian bencana tersebut meliputi bencana banjir, gempa bumi dan cuaca ekstrem belum termasuk Wabah Penyakit yang sampai sekarang masih menjadi pandemi. Kejadian bencana cuaca ekstrem merupakan kejadian bencana yang paling sering terjadi. Kejadian bencana-bencana yang pernah terjadi menimbulkan dampak negatif, baik itu korban jiwa, harta benda maupun lingkungan/lahan yang rusak serta dampak psikologis bagi masyarakat di Kabupaten Cirebon.

Hubungan pentahelix dalam penanggulangan bencana digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1. Pentahelix Penanggulangan Bencana



Empat aspek Penanggulangan Bencana (PB) dengan melibatkan elemen pentahelix ini kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan BPBD Kabupaten Cirebon dengan indikator kinerjanya:

Gambar 3.2. Hubungan Aspek Penanggulangan Bencana dan Indikator Kinerja BPBD



Indikator Sasaran dan Program yang merupakan implementasi dari aspek penanggulangan bencana ini kemudian dituangkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Perjanjian Kinerja BPBD tahun 2023. Pelaksanaan penilaian Perjanjian Kinerja (Perkin) kemudian dilaksanakan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BPBD dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BPBD beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2023 (Sasaran Strategis dan Program)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Menurunnya Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Point	150,80	144,56	100% (karena target menurunkan IRBI)

Sumber: BPBD Kabupaten Cirebon

Pada tahun 2023, indikator sasaran strategis BPBD dengan target 150,80 point, dan realisasinya adalah 144,56 point, maka capaian nya adalah 100% , karena semakin turun nilai realisasi nya maka nilai capaian nya indeks risiko bencana nya dalam kategori sangat baik.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis BPBD yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran Strategis: Menurunnya Indeks Risiko Bencana

Tolok ukur capaian sasaran menurunnya indeks risiko bencana dalam penanggulangan bencana diukur dengan 1 (satu) indikator, yaitu indikator: indeks risiko bencana (IRBI) dalam Penanggulangan Bencana.

Kinerja sasaran menurunnya indeks risiko bencana dalam Penanggulangan Bencana Meningkat dengan indikator Indeks Risiko Bencana dalam Penanggulangan Bencana pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	2023			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2023 (%)
		Target	Realisasi	Capaian%		
1	2	4	5	6	7	8
1	Indeks Risiko Bencana	150,80	144,56	100%	145,80	99,31%

Sumber: BPBD Kabupaten Cirebon

Pada tahun 2023, capaian target indikator sasaran strategis BPBD telah mencapai 92,90 atau tingkat capaian 100%. Capaian ini digambarkan dalam grafik berikut:

Gambar 3.3. Target dan Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2023



Dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja dari tahun 2022 – 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.5. Capaian Indikator Sasaran BPBD Tahun 2022-2023

Indikator Sasaran PD	Tahun 2022		Tahun 2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Risiko Bencana dalam Penanggulangan Bencana	155,80	156,58	150,80	144,56

Sumber: BPBD Kabupaten Cirebon

3.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA LAINNYA

3.3.1 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Indikator kinerja BPBD Kabupaten Cirebon yang termasuk dalam standar nasional adalah indikator kinerja pada program kegiatan yang realisasi dan capaiannya dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.7. Capaian Standar Pelayanan Minimal/Indikator Kinerja Kunci Outcome Sub Urusan Bencana Tahun 2023

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TAHUN 2021				Keterangan
		Target Nasional	Realisasi BPBD Kabupaten Cirebon			
			Jumlah orang yang berhak mendapat layanan	Jumlah orang yang terlayani	Capaian = (5):(4) X 100%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	2464	2464	100%	Kegiatan pemberian informasi rawan bencana dapat meliputi: a. Sosialisasi tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana; b. Sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia; dan c. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	2464	2464	100%	Data diambil dari Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah jumlah warga yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan gladi kesiapan terhadap bencana di kawasan rawan bencana sebagai bentuk layanan langsung yang diterima oleh warga negara sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota.
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	134687	134687	100%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah jumlah warga negara yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari kejadian bencana sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota.

3.4 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Dari deskripsi capaian indikator kinerja dan pelaksanaan kegiatan diatas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kinerja BPBD Kabupaten Cirebon tahun 2023 berpredikat sangat baik dengan capaian indikator kinerja berupa Indeks Risiko Bencana dalam Penanggulangan Bencana 144,56 atau tercapai 100% dari target. Diketahui juga faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

A. Faktor Pendorong

1) Capaian indikator kinerja progam 100%;

Dari pembahasan diatas, telah diuraikan hubungan antara Penghitungan Indeks Risiko Bencana dalam Penanggulangan Bencana dan capaian indikator kinerja program. Untuk mencapai realisasi target Indeks Risiko Bencana dalam Penanggulangan Bencana 100% maka capaian terget indikator kinerja program juga harus 100%.

2) Kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi berkala;

Pada tahun 2023, kegiatan monitoring dan evaluasi regular dilaksanakan minimal 1 (satu) bulan sekali, sedangkan untuk pembahasan-pembahasan khusus, rapat koordinasi dan pengendalian dilaksanakan sewaktu-waktu diperlukan. Selain peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi, perbaikan tatalaksana juga terus dilakukan peningkatan.

3) Transparansi data dan informasi;

Pengelolaan data dan informasi BPBD pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan, dimana masing-masing bidang telah memiliki sumber data yang terkoneksi melalui website, atau kita bisa mendapatkan data dan informasi dari TIM unit data dan informasi penanggulangan bencana.

4) Pelibatan lintas sektoral dalam pelaksanaan kegiatan;

Pelibatan lintas sektoral menjadi salah satu perhatian utama pada tahun 2023 dan pengembangan pada tahun-tahun seterusnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, kerjasama lintas sektoral yang dilaksanakan oleh BPBD masih bersifat non formal dan belum ada legalitas serta mekanisme yang memadai.

B. Faktor Penghambat

Selain faktor pendorong, beberapa hal dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan pemenuhan indikator kinerja masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah:

1. Jumlah alat pemantau permukaan sungai secara kuantitas masih kurang;
2. Masih kurangnya Sumberdaya Manusia yang memiliki kemampuan tentang penanggulangan bencana;
3. Belum dilakukan kurasi aman bencana bagi bangunan sekolah secara masif;
4. Jumlah pemasangan petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul belum mencakup keseluruhan fasilitas-fasilitas umum dan belum menyebar di beberapa daerah rawan bencana;
5. Dokumen Kajian Risiko Bencana belum dilegalkan oleh kepala daerah;

3.5 REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2023 sebesar 90,16% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 94,29% dan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 93,56%. Sedangkan pencapaian fisik kegiatan adalah 100%. Melihat hal ini, dapat disimpulkan bahwa kinerja BPBD Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 sudah baik.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Sisa Tahun 2023 (Rp)	Penyerapan %
	Belanja Daerah	Rp 7.500.184.100	Rp 6.761.969.591	Rp 738.214.509	90,16
	Belanja Operasi	Rp 6.801.400.100	Rp 6.065.959.591	Rp 735.440.509	89,19
	Belanja Modal	Rp 698.784.000	Rp 696.010.000	Rp 2.774.000	99,60
01:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.905.345.500	Rp 4.339.233.691	Rp 566.111.809	88,46
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 35.038.800	Rp 30.342.800	Rp 4.696.000	86,60
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 22.222.000	Rp 20.826.000	Rp 1.396.000	93,72
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 5.664.600	Rp 5.664.600	Rp -	100,00
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 7.152.200	Rp 3.852.200	Rp 3.300.000	53,86

B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.849.109.300	Rp 3.589.026.465	Rp 260.082.835	93,24
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.835.813.600	Rp 3.325.810.580	Rp 510.003.020	86,70
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 7.157.000	Rp 7.127.000	Rp 30.000	99,58
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp 6.138.700	Rp 6.138.700	Rp -	100,00
C.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 700.041.100	Rp 667.246.157	Rp 32.794.943	95,32
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp 15.155.600	Rp 15.064.000	Rp 91.600	99,40
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 430.237.300	Rp 430.038.300	Rp 199.000	99,95
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 6.816.100	Rp 6.816.100	Rp -	100,00
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 8.283.400	Rp 6.783.400	Rp 1.500.000	81,89
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 21.584.600	Rp 12.594.200	Rp 8.990.400	58,35

11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 27.000.000	Rp 23.900.000	Rp 3.100.000	88,52
12	Penyediaan Bahan/ Material	Rp 79.999.900	Rp 73.551.800	Rp 6.448.100	91,94
13	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 10.999.200	Rp 6.245.000	Rp 4.754.200	56,78
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 99.965.000	Rp 92.253.357	Rp 7.711.643	92,29
D.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 12.000.000	Rp 4.063.154	Rp 7.936.846	33,86
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 12.000.000	Rp 4.063.154	Rp 7.936.846	33,86
E.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 309.156.300	Rp 298.505.300	Rp 10.651.000	96,55
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 79.915.000	Rp 76.705.700	Rp 3.209.300	95,98
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 148.755.500	Rp 141.313.800	Rp 7.441.700	95,00

18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 30.540.000	Rp 30.540.000	Rp -	100,00
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 49.945.800	Rp 49.945.800	Rp -	100,00
01:02	Program Penanggulangan Bencana	Rp 2.594.838.600	Rp 2.422.735.900	Rp 172.102.700	93,37
F.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp 91.109.400	Rp 91.109.400	Rp -	100,00
20	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Rp 91.109.400	Rp 91.109.400	Rp -	100,00
G.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp 1.681.764.800	Rp 1.535.024.000	Rp 146.740.800	91,27
21	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Rp 250.000.000	Rp 224.220.000	Rp 25.780.000	89,69
22	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rp 1.431.764.800	Rp 1.310.804.000	Rp 120.960.800	91,55
H.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp 700.000.000	Rp 685.326.500	Rp 14.673.500	97,90

23	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp 700.000.000	Rp 685.326.500	Rp 14.673.500	97,90
I.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rp 121.964.400	Rp 111.276.000	Rp 10.688.400	91,24
24	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Rp 61.421.000	Rp 61.421.000		100,00
25	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Rp 60.543.400	Rp 49.855.000	Rp 10.688.400	82,35
Jumlah		Rp 7.500.184.100	Rp 6.761.969.591	Rp 738.214.509	90,16

Capaian Realisasi Anggaran Belanja Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon selama periode tahun 2023 secara keseluruhan dan di bagi menjadi dua program dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1: Tabel serapan anggaran

Program	Target		Realisasi		%
	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	4.906.345.500		4.339.233.691	88,46
Program Penanggulangan Bencana	100%	2.594.838.600		2.422.735.900	93,37

Berdasarkan data pada tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2022 anggaran belanja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon melalui mekanisme Perhitungan Efektivitas Anggaran Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon di dapatkan hasil seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 2: Perhitungan Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja

Program	Anggaran	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi	Kriteria
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.906.345.500	4.339.233.691	88,46	Efektif

Program Penanggulangan Bencana	2.594.838.600	2.422.735.900	93,37	Efektif
--------------------------------------	---------------	---------------	-------	---------

Dengan demikian realisasi anggaran belanja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon dapat dikatakan efektif.

Sedangkan untuk Perhitungan Efisiensi Anggaran Belanja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 3: Perhitungan Efisiensi Anggaran Belanja pada
BPBD Kabupaten Cirebon

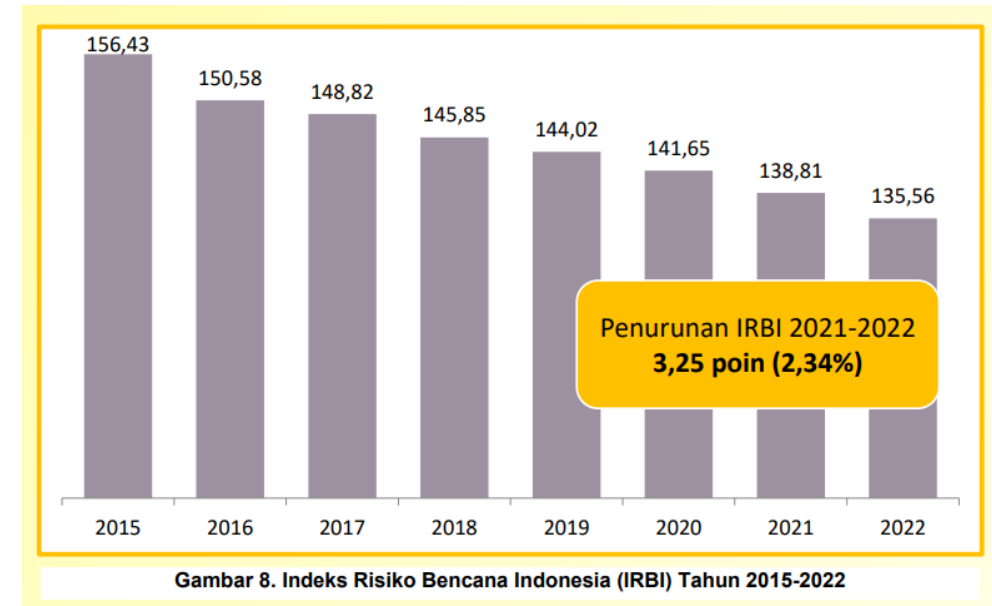
Program	Anggaran	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi	Kriteria
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.906.345.500	4.339.233.691	88,46	Efisien
Program Penanggulangan Bencana	2.594.838.600	2.422.735.900	93,37	Efisien

Berdasarkan data yang ada pada tabel diatas maka dapat disimpulkan secara keseluruhan tingkat efisiensi Anggaran Belanja Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon berada pada kriteria efisien.

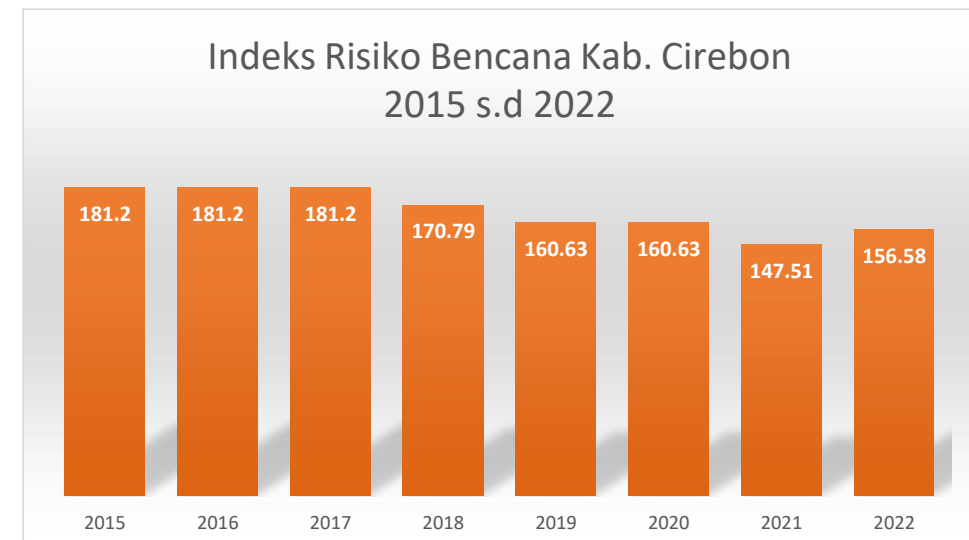
3 Benchmark Perbandingan Kinerja

PERBANDINGAN KINERJA

- BNPB
- BPBD Provinsi Jabar
- BPBD Kabupaten Cirebon



Grafik nilai indeks risiko Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2022



BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. Kesimpulan
2. Saran

Kesimpulan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*. SAKIP merupakan sebuah system dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance-base Management) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.

LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi selama tahun anggaran 2023. Laporan tersebut merupakan implementasi dari Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai keberhasilan sasaran di tahun 2023 yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan rencana, menunjukkan capaian rata-rata indikator kinerja sasaran **baik**.

Dari hasil pengukuran kinerja nampak bahwa secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berhasil mencapai target kinerja sasaran dan kegiatan serta telah dapat memenuhi fungsi yang dibebankan pada organisasi dari 2 (Dua) sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Meskipun secara rata-rata capaian sasaran dan kegiatan sangat baik, namun belum seluruh target kinerja sasaran maupun kegiatan dapat dicapai seperti yang diharapkan. Hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor lingkungan baik internal misalnya sosialisasi, mengukur, mencatat dan melaporkan kinerja yang terjamin integritas data dan ketepatan waktunya mesti terus ditingkatkan, maupun lingkungan eksternal misalnya kerjasama, sinergi dan kualitas komunikasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta lembaga atau pihak-pihak lainnya yang harus terus ditingkatkan, dengan demikian kinerja organisasi terutama capaian sasaran diharapkan dapat dicapai sesuai rencana yang ditetapkan.

Saran

Sangat disadari masih diperlukan perbaikan di berbagai bidang agar dapat mempertahankan bahkan untuk meningkatkan kinerja yang telah dicapai organisasi. Adapun hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk tahun-tahun yang akan datang guna mencapai kinerja yang lebih baik dari setiap jajaran di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka diperlukan:

1. Penyempurnaan implementasi anggaran berbasis kinerja agar seluruh kegiatan dapat dinilai kinerjanya secara tepat.
2. Indikator kinerja kegiatan dan indikator program perlu disempurnakan secara terus menerus melalui upaya identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi secara terus menerus sehingga dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian program/kegiatan di masing-masing unit kerja pelaksana kegiatan di lingkungan

Sekretariat Daerah.

3. Peningkatan pengkoordinasian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon itu sendiri, baik peningkatan pengkoordinasian APBD maupun penyusunan perumusan kebijakan dan program kerja dalam pelaksanaan operasional pemerintah daerah.

Ditetapkan di : Sumber

Pada Tanggal : Februari 2024

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Cirebon

Dr. DENI NURCAHYA, ST., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19711021 200501 1 003